

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang proses penentuan kontraktor pemenang lelang pada proyek-proyek milik pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pelelangan pada 7 proyek pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi objek penelitian secara garis besar sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Instansi pemerintah berdasar Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: S-42/A/2000/ Nomor: S-2262/D.2/05/2000 dan Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 2000. Kecuali pada 3 proyek dari 7 proyek yang diteliti terjadi penyimpangan pada tahap evaluasi teknik dan evaluasi harga.
- 2) Pada beberapa proses pelelangan proyek Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000-2002 terdapat faktor-faktor lain diluar dari ketentuan-ketentuan / peraturan-peraturan pelelangan yang berlaku, yang mempengaruhi penentuan pemenang lelang. Penulis menyebut

faktor-faktor tersebut sebagai faktor X karena setelah menganalisa data penulis menemukan kegagalan-kegagalan pada proses penentuan kontraktor pemenang tersebut, yaitu pada 3 proyek (Proyek Peningkatan Jalan Simpang Empat Jombor, Proyek Peningkatan Jalan Janti Fly Over, proyek Perbaikan Fasilitas Olahraga Kopertis Wilayah V). Pada wawancara yang dilakukan terhadap panitia-panitia pelelangan yang bersangkutan (responden) penulis tidak dapat memperoleh alasan dan informasi yang tepat tentang faktor-faktor lain tersebut, sehingga disebut faktor X.

7.2 Saran

Proses penentuan kontraktor pemenang lelang di lingkungan proyek-proyek pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pelelangan tersebut harus dilakukan secara disiplin untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang bersifat tidak adil pada hasil keputusan pemenang lelang, serta untuk menghindari adanya protes dan sanggahan dari peserta tentang hasil pelelangan. Dengan penegakan disiplin akan tercipta sistem kerja yang lebih profesional.

Pada proses evaluasi administrasi perlu di tambahkan peninjauan lapangan terhadap proyek-proyek yang mengikuti tahap tersebut, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara data-data administrasi dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan. Hal ini untuk mempersempit kemungkinan munculnya faktor X.